

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

##### 2.1.1 Tinjauan Mengenai Pemberdayaan

###### 2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan juga terus dilakukan oleh pemerintah baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Kegiatan Pemberdayaan juga harus dilandasi oleh aspek-aspek pemberdayaan dan bertujuan agar program pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* yang jelas.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bentuk dari pembangunan sektor perekonomian yang menggunakan nilai unggul masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan karya baru dalam program pembangunan yang berfokus pada manusia, partisipasi, memberdayakan dan pembangunan yang berkesinambungan (Makandolu, dkk 2023). Pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan di masyarakat dengan membagi kekuasaan dari kelompok yang berkuasa (*powerfull*)

kepada mereka yang tidak memilikinya (*powerless*) agar terjadi keseimbangan antara penguasa dan yang dikuasai sehingga kondisi-kondisi memperdayai tidak terjadi.

Menurut Suharto (dalam Hamid, 2018) pemberdayaan bertitik tekan pada kemampuan yang lemah pada diri seseorang atau kelompok, sehingga diharapkan mampu:

#### 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Mewujudkan kondisi di mana setiap individu tercukupi kebutuhan pokoknya, sehingga terbebas dari belenggu kelaparan, minimnya akses pendidikan, dan masalah kesehatan yang menghambat kualitas hidup.

#### 2. Peningkatan Kapasitas Ekonomi

Mengoptimalkan potensi pendapatan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya produktif secara efektif dan efisien, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap barang dan jasa berkualitas yang menunjang kesejahteraan.

#### 3. Partisipasi Aktif dalam Pembangunan

Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Menurut Suharto (2009), pemberdayaan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan atau kapasitas kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Sasaran utama dari pemberdayaan adalah menciptakan kondisi atau hasil dari perubahan

sosial, di mana masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki otoritas, pengetahuan, serta keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat yang telah mengikuti proses pemberdayaan diharapkan mampu menyampaikan aspirasi, aktif berpartisipasi dalam kegiatan lokal, mandiri dalam menjalani peran kehidupannya, serta memiliki sumber penghidupan.

Upaya pemberdayaan terus digencarkan oleh pemerintah, baik melalui kementerian maupun pemerintah daerah. Program pemberdayaan merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya program tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menjadi individu yang mandiri, memiliki keterampilan, dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara optimal.

#### 2.1.1.2 Unsur-unsur Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan yang begitu kompleks dan mencakup multidimensi. Unsur-unsur dalam pemberdayaan begitu mempengaruhi kesuksesan program pemberdayaan yang akan dilakukan. Unsur-unsur pemberdayaan mencakup berbagai aspek yang memiliki tujuan untuk peningkatan kapasitas, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Siti Kurniasih, dkk (2024) dalam buku konsep pemberdayaan unsur-unsur pemberdayaan sebagai berikut:

## 1. Partisipasi aktif

Partisipasi yang aktif dalam proses pemberdayaan merupakan inti dari kegiatan pemberdayaan. Tanpa adanya partisipasi proses pemberdayaan tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga *output* dari pemberdayaan tidak tercapai. Partisipasi aktif juga dapat mendorong partisipan dalam menyuarakan ide, aspirasi dan kebutuhan dari partisipan. Pengertian partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980) adalah suatu proses dimana individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan berdampak pada kehidupan mereka sendiri atau pada komunitas di lingkungan mereka. Menurut Cohen dan Uphoff (1980) Partisipasi dibagi menjadi empat macam kegiatan antara lain

### 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap program yang akan dijalankan.

### 2) Partisipasi dalam implementasi

Partisipasi dalam implementasi ini merupakan partisipasi yang harus dilakukan oleh semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan program pemberdayaan sehingga dalam mengimplementasikan program dapat berjalan dengan baik sehingga manfaat yang dihasilkan dari program dapat maksimal.

### 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat sehingga hasil dari pemberdayaan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang dimaksud adalah

masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan dapat merasakan manfaat dari program pemberdayaan yang telah dilakukan sehingga dapat mengubah kondisi ekonomi mereka.

#### 4) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Pada kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi untuk menilai/mengevaluasi program yang telah dilakukan. Masyarakat dapat memberikan ide atau gagasan yang kemudian dapat dijadikan dasar oleh pemerintah/pelaksana program dalam merencanakan program pemberdayaan kedepannya.

### 2. Pengembangan kapasitas

Peningkatan kapasitas individu dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan dari partisipan dan juga untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pengembangan kapasitas ini merupakan kegiatan inti dari pemberdayaan, dalam kegiatan ini partisipan diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan agar dapat memanfaatkan/mengelola sumber daya yang dimiliki.

### 3. Akses terhadap sumber daya

Pemberdayaan harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya. Menurut penjelasan dari Pakpahan, dkk (2024) sumber daya tersebut meliputi air, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan publik. Tujuan akses tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa memandang kondisi sosial ataupun kondisi ekonomi dari masyarakat tersebut. Akses terhadap informasi

yang akurat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga mereka paham mengenali sumber daya yang ada dan juga keterampilan yang dimiliki dapat ditingkatkan. Program Sekolah Perempuan, Anak, dan Masyarakat Marjinal menyediakan pelatihan dan pendidikan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan pembuatan kue kering, pembuatan tas dari barang bekas, pelatihan menjahit dan pemanfaatan sampah menjadi pupuk. Kegiatan pendidikan dalam program SAPA MAMA meliputi kegiatan penyuluhan terkait pola asuh orangtua, bahaya menikah dini dan lain-lain. Peserta program SAPA MAMA dapat mengakses beberapa fasilitas tersebut ketika mereka aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh SAPA MAMA.

#### 4. Kepimimpinan lokal yang kuat

Pemimpin yang kuat memiliki karakter yang visioner, inovatif, inklusif, adil, dan dekat dengan masyarakat. Karakter-karakter tersebut akan mempermudah masyarakat dalam memberikan gagasan pikiran yang dimiliki oleh masyarakat dan kemudian dapat ditampung dengan baik oleh pemimpin. Pemimpin yang baik juga dapat membangun relasi kemitraan yang luas kemudian juga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang partisipatif dan dapat menyediakan akses terhadap sumber daya.

#### 5. Pemberdayaan ekonomi

Pengertian pemberdayaan ekonomi menurut Pakpahan, dkk (2024) adalah kegiatan membangun ekonomi lokal dengan memberikan fasilitas dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pelatihan kewirausahaan, akses dalam mencari modal usaha, promosi usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Hardiansyah

(2023) pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan guna memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan baru untuk bersaing dalam mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peneliti akan menjadikan unsur-unsur pemberdayaan ini sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan digunakan oleh peneliti meliputi partisipasi aktif, akses terhadap sumber daya dan pemberdayaan ekonomi. Unsur-unsur tersebut akan digali oleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

#### 2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip merupakan suatu komitmen yang dirancang dan disepakati bersama oleh *stake holder* untuk mencapai tujuan bersama. Adapun prinsip yang dimaksud menurut Effendi dalam buku (Bahri, 2019) terdapat sembilan prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip partisipasi

Segala tahapan kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat binaan.

2. Prinsip *sustainable*

Hasil dari pemberdayaan yang didapatkan mampu dilestarikan oleh masyarakat binaan agar mampu melanjutkan program kegiatan secara berkelanjutan.

3. Prinsip demokratisasi

Memberikan kesempatan kepada masyarakat binaan agar mampu menentukan jenis strategi daerah pembangunan sesuai dengan kebutuhan kapasitas yang mereka miliki.

4. Prinsip transparansi

Keterlibatan beberapa pihak dan masyarakat binaan dalam keuangan dilakukan secara transparan atau terbuka agar dapat dipantau dan diawasi oleh semua pihak.

5. Prinsip *akuntabilitas*

Maksud dari prinsip *akuntabilitas* diartikan sebagai tanggung jawab suatu lembaga kepada publik atas kesuksesan ataupun kegagalan dalam melaksanakan program yang dijalankan. Prinsip ini penting agar dampak dari program dapat dinikmati oleh mereka yang menjadi sasaran program.

6. Prinsip *desentralisasi*

Prinsip ini berkehendak untuk tidak lagi segala petunjuk dan aturan-aturan tersentralisasi pada pemerintah, namun lebih kepada bagaimana masyarakat binaan mampu perencanaan (*planning*), pembagian tugas (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan evaluasi.

7. Prinsip *acceptable*

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat binaan hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kultur sehingga dapat dikelola sebaik mungkin dan di dayagunakan oleh mereka sebagai pelaksana dan pengelola.

#### 8. Prinsip *profitable*

Mendidik masyarakat binaan agar mampu mengelola kegiatan pemberdayaan secara ekonomis, dan bisa menyejahterakan anggotanya dari kegiatan yang dilakukan.

#### 9. Prinsip *replicable*

Pengelolaan dana dan hasil pelestarian dapat dikembangkan pada aspek yang lebih luas.

##### 2.1.1.4 Tujuan Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa tujuan sehingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan diharapkan dapat mengangkat taraf kehidupan sasaran menjadi lebih berdaya, sejahtera, kemandirian dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara baik. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (dalam Hamid, 2018), terdapat beberapa tujuan pemberdayaan yaitu:

##### 1. *Better Education*

Perbaikan pendidikan seharusnya menjadi bagian penting dari tujuan pemberdayaan, karena pendidikan adalah dasar untuk mencapai keberlanjutan. Upaya perbaikan pendidikan tidak hanya harus fokus pada materi, metode, waktu, tempat, dan interaksi antara pengajar dan masyarakat, tetapi juga harus mendorong masyarakat untuk terus belajar tanpa batasan waktu dan usia.

##### 2. *Better Accessibility*

Dalam hal perbaikan aksesibilitas, diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sumber informasi, keuangan, produk, peralatan, dan lembaga pemasaran.

### 3. *Better Action*

Adanya kegiatan perbaikan pendidikan dan aksesibilitas yang beragam (SDA, SDM, dan sumber daya lainnya) maka diharapkan mampu melahirkan tindakan yang semakin membaik.

### 4. *Better Institution*

Untuk menjalin kemitraan usaha, maka perlu adanya perbaikan kelembagaan. Perihal ini akan berdampak pada meningkatnya posisi tawar yang kuat pada masyarakat.

### 5. *Better Business*

Dengan bermodalkan tempat usaha, maka secara langsung dan nyata akan berdampak pada perbaikan usaha atau bisnis yang dikembangkan.

### 6. *Better Income*

Dengan adanya perbaikan usaha atau bisnis yang terus dikembangkan maka diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperoleh baik ada cakupan keluarga maupun kelompok.

### 7. *Better Environment*

Perbaikan pendapatan yakni modal yang dimiliki, maka akan berdampak pada perbaikan lingkungan baik secara fisik maupun sosial.

### 8. *Better Living*

Disaat pendapatan masyarakat atau keluarga otomatis perbaikan lingkungan meningkat, maka tentunya akan mampu menciptakan situasi kehidupan yang lebih baik.

## 9. *Better Community*

Perbaikan masyarakat akan tercipta dikala lingkungan yang baik secara fisik dan sosial dan situasi kehidupan yang lebih baik dapat terwujud.

### 2.1.1.5 Tahapan Pemberdayaan

Proses pemberdayaan kepada masyarakat memerlukan adanya tahapan-tahapan yang direncanakan agar tercapai keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan. Tahapan ini dilaksanakan agar masyarakat lebih dekat dengan pemberdayaan dan juga sebagai upaya untuk pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

#### 1. Tahap persiapan (*engagement*)

Pada tahap persiapan dapat dilakukan dengan melakukan observasi terlebih dahulu mengenali lokasi yang akan dilakukan kegiatan pemberdayaan. Pengenalan lokasi tersebut bertujuan untuk mengetahui budaya yang ada di masyarakat dan juga mengetahui infrastruktur yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Dalam tahap ini dapat mengumpulkan beberapa *stakeholder* yang ada di wilayah untuk meminta izin ataupun menggali informasi sehingga sebelum melakukan *assesment* kepada masyarakat sudah memiliki beberapa informasi yang dapat dimanfaatkan pada proses perencanaan.

#### 2. Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun

prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Kegiatan ini dapat menggunakan *tools assesment* berupa *Method of Participatory Assesment* (MPA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan lain-lain. Hasil pengkajian ini akan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

6. Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk

suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

#### 7. Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

### **2.1.2 Tinjauan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)**

#### 2.1.2.1 Pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah perempuan atau anak perempuan yang berusia antara 18 hingga 59 tahun yang menghadapi tantangan dalam sektor perekonomian, sehingga mendorong mereka untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dasar. PRSE termasuk dalam kelompok perempuan yang berada dalam situasi rawan dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2012, PRSE merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PRSE adalah perempuan yang sudah menikah, belum menikah, atau janda yang tidak memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perempuan yang termasuk dalam kategori fakir miskin khususnya perempuan kepala keluarga, dianggap sebagai kelompok rawan sosial ekonomi.

Fakir miskin adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

#### 2.1.2.2 Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 tahun 2012 menjelaskan kriteria kelompok yang dianggap rawan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) termasuk perempuan yang tergolong sebagai PMKS. Selanjutnya kriteria dari PRSE antara lain seperti:

##### 1. Perempuan Kepala Keluarga

Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga akibat ditinggal cerai/mati/pergi ataupun sang suami sudah tidak dapat bekerja.

##### 2. Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran ekonomi dalam rumah tangga.

##### 3. Perempuan dalam Kemiskinan

Perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, pelatihan, kesehatan, atau pekerjaan yang layak.

##### 4. Korban Diskriminasi Gender

Perempuan yang menghadapi ketidakadilan atau perlakuan tidak setara di masyarakat atau lingkungan kerja akibat stereotip gender.

### 2.1.2.3 Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kultural. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PRSE sebagai berikut:

#### 1. Kemiskinan dan Ketidakmampuan Ekonomi

Suharto (2009) menyatakan bahwa kemiskinan perempuan merupakan persoalan multidimensi yang disebabkan oleh ketidaksetaraan distribusi kekuasaan, kesempatan, dan kepemilikan aset yang tidak menguntungkan perempuan dalam sistem sosial

#### 2. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Keterampilan

Menurut Sumardi (2015), pendidikan berperan penting dalam proses pemberdayaan sosial karena menjadi media pembentukan kemampuan dan kepercayaan diri individu untuk keluar dari kondisi ketergantungan.

#### 3. Pekerjaan yang Tidak Layak

Perempuan rawan sosial ekonomi sering bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk, seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan tanpa jaminan sosial, sehingga mereka rawan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan ekonomi.

#### 4. Keterbatasan dalam Akses Layanan Kesehatan

Data dari Kementerian Kesehatan RI (2022) menunjukkan bahwa perempuan dari rumah tangga miskin cenderung mengalami hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan gizi dasar secara optimal. Keterbatasan ini memperburuk kondisi kesehatan mereka dan menghambat usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

## 5. Kekerasan dan Diskriminasi Sosial

Perempuan rawan sosial ekonomi sering menjadi korban kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah. Yuniarti (2013) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk ketimpangan relasi sosial yang memperlemah kemampuan individu untuk mengakses perlindungan sosial dan hak-haknya sebagai warga negara.

### **2.1.3 Tinjauan tentang Program SAPA MAMA**

#### 2.1.3.1 Pengertian Sekolah Perempuan, Anak, dan Masyarakat Marjinal

Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan perempuan baik di tingkat nasional, daerah maupun desa sangatlah beragam, akan tetapi hal tersebut masih dirasa belum mendorong hasil yang signifikan terutama yang berkaitan dengan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku untuk mengurangi ketimpangan gender. Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif Gender”. dengan target capaian Indikator Pembangunan Gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 100%.

Data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 93,76 diatas angka IPG capaian Jawa Timur yaitu 91,67. Capaian ini masih harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai target angka 100% pada akhir tahun 2023, sebagaimana target Indikator Kinerja Program terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta Kabupaten Layak anak

dan Responsif Gender, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Sapa Mama atau Sekolah Perempuan, Anak, dan Masyarakat Marjinal adalah suatu lembaga sekolah non formal yang dikembangkan untuk mengedukasi dan memberikan pendidikan alternatif bagi perempuan, anak dan masyarakat marjinal di desa/kelurahan di Kabupaten Nganjuk. Program Sapa Mama tetap berlanjut hingga sekarang, sesuai dengan keputusan Bupati Nganjuk No. 188/90/K/411.304/2025 tentang penunjukan fasilitator untuk keberlanjutan Program Sapa Mama di Kabupaten Nganjuk.

Sapa Mama hadir sebagai ikhtiar pemerintah guna mengatasi permasalahan kesenjangan gender terhadap perempuan dan laki-laki, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan masyarakat marjinal hingga ke Desa/Kelurahan, dan mengentaskan permasalahan yang terjadi melalui peningkatan aksesibilitas, partisipasi, kontrol serta menerima manfaat semua bidang pembangunan. Sekolah perempuan, anak, dan masyarakat marjinal atau yang disingkat Sapa Mama adalah tempat belajar dan memberdayakan diri, bagi perempuan, anak dan masyarakat marjinal lainnya, terutama bagi perempuan, anak dan masyarakat marjinal yang masih mengalami kemiskinan multidimensi di pedesaan maupun perkotaan (Modul Program Sapa Mama 2020).

#### 2.1.3.2 Tujuan Sekolah Perempuan, Anak, dan Masyarakat Marjinal

Penyelenggaraan Sapa Mama atau Sekolah Perempuan, anak, dan masyarakat marjinal adalah untuk mengatasi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan masyarakat marjinal hingga ke Desa/Kelurahan, dan mengentaskan permasalahan

yang terjadi melalui peningkatan aksesibilitas, partisipasi, kontrol serta menerima manfaat pembangunan di semua bidang. Tujuan dari penyelenggaraan Sapa Mama adalah menyiapkan perempuan, anak, dan masyarakat marjinal agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan untuk meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan mereka (Modul Program Sapa Mama 2020).

#### 2.1.3.3 Visi dan Misi Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal

Modul Program Sapa Mama (2020) terdapat visi Sapa Mama yaitu “Mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk”. Misi dari penyelenggaraan Sapa Mama adalah:

1. Membentuk model pemberdayaan perempuan, anak, dan masyarakat marjinal dikalangan akar rumput melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan (*sustainable*);
2. Mengembangkan peran perempuan, anak, dan masyarakat marjinal agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan;
3. Meningkatkan partisipasi bagi perempuan, anak, dan masyarakat marjinal terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan;
4. Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk percepatan tercapainya Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) Desa;

5. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi program dan kegiatan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### 2.1.3.4 Prinsip Penyelenggaraan SAPA MAMA

Prinsip penyelenggaraan Sapa Mama bersifat *universal* dan sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan dan berlaku untuk semua pihak. Adapun prinsip-prinsip terdapat pada modul Program Sapa Mama (2020) antara lain:

1. Keadilan dan kesetaraan gender

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan masyarakat marjinal.

2. *Universal*

Prinsip universal adalah berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia, Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marjinal seharusnya menjadi ruang bagi perempuan, anak dan masyarakat marjinal lainnya untuk memenuhi hak-hak asasi sebagai manusia.

3. Non Diskriminatif

Prinsip non diskriminasi yaitu menghargai persamaan derajat, tidak membedakan kepada semua pihak baik atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

4. Demokrasi

Prinsip ini menjadi pilar penting dalam membangun gerakan organisasi perempuan, anak dan masyarakat marjinal lainnya agar mampu melahirkan kepemimpinan yang demokratis.

5. Penghormatan terhadap martabat

Prinsip ini bertujuan untuk mengakomodir keputusan-keputusan perempuan, anak dan masyarakat marjinal sebagai individu, terutama mereka yang masih dalam kondisi kerawanan dan termarginalkan.

6. Inklusif dan Empati

Prinsip ini memberikan pembelajaran penting bahwa Sapa Mama bukan menjadi wadah satu golongan perempuan, anak dan masyarakat marjinal, namun keberagaman dan pluralitas adalah yang diutamakan sehingga terbangun rasa empati untuk memperkuat solidaritas.

7. Partisipasi aktif,

Prinsip ini penting karena Sapa Mama tidak hanya mendorong adanya pencapaian secara kuantitatif terhadap berapa perempuan, anak dan masyarakat marjinal lainnya yang didorong ke ranah publik, namun juga berapa banyak perubahan kebijakan yang telah responsif gender dan berpihak pada perempuan, anak dan masyarakat marjinal lainnya.

8. Transparansi dan Akuntabilitas (Keterbukaan dan Kejelasan informasi)

Sapa Mama adalah ruang belajar untuk menerapkan keterbukaan informasi dan penganggaran bagi pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat marjinal.

9. Cukup Sumber Daya,

yang dimaksud pada cukup sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pendanaan namun juga sumber daya manusia, ide dan kreatifitas.

## 10. Kemitraan dan Kolaborasi

Sapa Mama harus tumbuh dan berkembang melalui kerja sama kemitraan dan kolaborasi seluruh pihak, bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja.

### **2.1.4 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dengan Masyarakat**

#### 2.1.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow dalam buku Suharto (2009) Pekerjaan sosial adalah profesi untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka dalam kehidupan agar dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Pekerja sosial berlandaskan pada tiga komponen yaitu kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*) dan kerangka nilai (*body of values*). Ketiga komponen tersebut dibentuk dan dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, politik dan ekonomi.

Pekerjaan sosial, menurut Taufiqurokhman, dkk (2020), adalah profesi yang berfokus pada bantuan dan dukungan terhadap keberfungsian sosial individu dalam interaksi dan hubungan mereka dengan lingkungan sosial. Aspek keberfungsian sosial ini menjadi pembeda utama antara pekerjaan sosial dan profesi pertolongan lainnya. Definisi pekerjaan sosial juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa pekerjaan sosial profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta dengan kompetensi dalam bidang ini, serta memiliki kepedulian yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik untuk menangani masalah sosial.

Pekerjaan sosial menekankan intervensi dalam interaksi manusia dengan lingkungan, menggunakan teori perilaku manusia untuk meningkatkan keberfungsian masyarakat. Sebagai profesi yang profesional, praktiknya didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kesejahteraan sosial. Sasaran dari praktik ini mencakup individu, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi masalah dalam meningkatkan keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial sendiri merujuk pada kemampuan individu, keluarga, komunitas, atau masyarakat untuk menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

#### 2.1.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Seorang pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbaiki interaksi sosial pada individu. Setelah mendapatkan bantuan dari pekerja sosial, diharapkan individu tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi secara mandiri. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), mengembangkan kemampuan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang kemudian dapat memberikan sumber sehingga mereka memperoleh kesempatan.
3. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
4. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.

5. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
6. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

#### 2.1.4.3 Peran Pekerjaan Sosial

Peran pekerja sosial menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez dalam buku Suharto (2009) pekerja sosial memiliki lima peran antara lain seperti:

##### 1. Fasilitator

Peran fasilitator dijalankan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menghadapi permasalahan atau tekanan situasional yang dialaminya. Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial diharapkan dapat menentukan siapa saja yang perlu terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam menyediakan ruang bagi klien untuk menyampaikan aspirasi atau gagasan yang dimilikinya.

##### 2. *Broker*

Peran broker bertujuan agar pekerja sosial mampu mengidentifikasi serta mengakses sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam peran ini, pekerja sosial berfungsi sebagai penghubung antara klien dan sumber daya yang relevan.

### 3. Mediator

Peran mediator dari pekerja sosial berfungsi sebagai penengah yang netral. Pekerja sosial dituntut untuk bersikap adil tanpa memihak kepada salah satu pihak, serta membantu proses pencarian solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien.

### 4. Pembela

Peran sebagai pembela merupakan bentuk praktik pekerjaan sosial yang beririsan dengan aspek politik. Fungsi advokasi ini dilaksanakan ketika klien yang ditangani tengah menghadapi permasalahan hukum. Dalam hal ini, pekerja sosial bertugas untuk memperjuangkan hak-hak klien.

### 5. Pelindung

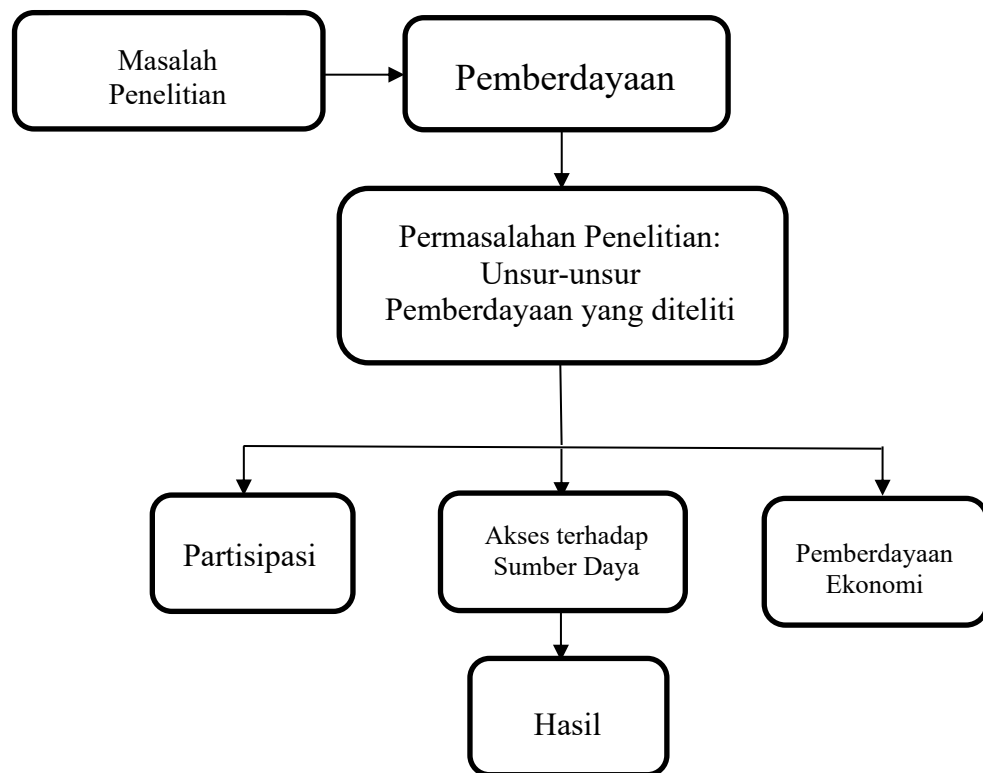
Peran pekerja sosial sebagai pelindung dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok yang rentan. Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban dan berupaya melindungi klien dari pengaruh kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat.

#### 2.1.4.4 Pekerjaan Sosial dalam Program SAPA MAMA

Permasalahan perempuan rawan sosial ekonomi merupakan permasalahan sosial yang harus ditangani secara profesional. Pekerja sosial memiliki peran dalam permasalahan ini. Peran pekerja sosial dalam penanganan permasalahan perempuan rawan sosial ekonomi begitu beragam dan dapat dilakukan dengan melihat kondisi kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan rancangan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya perempuan rawan sosial

ekonomi. Pekerja sosial dalam pemberdayaan ini berperan sebagai fasilitator, *educator* dan *broker*. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk pertemuan kelompok kemudian membahas mengenai permasalahan yang dialami oleh perempuan rawan sosial ekonomi dan menggali sumber potensi dari perempuan rawan sosial ekonomi maupun potensi lain yang ada di sekitar Desa Candirejo.

## 2.2 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Mengacu pada kerangka penelitian di atas, diketahui bahwa yang menjadi subjek adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). PRSE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerima manfaat dari Program Sekolah Perempuan, Anak, dan Masyarakat Marjinal. Topik yang akan diteliti adalah pemberdayaan PRSE di Desa Candirejo. Permasalahan yang akan diteliti didasarkan pada unsur pemberdayaan, yaitu partisipasi PRSE, akses terhadap sumber daya dalam pemberdayaan PRSE, dan pemberdayaan ekonomi PRSE.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai realitas yang dialami PRSE dalam mengikuti program tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial, interaksi, serta perubahan yang terjadi pada PRSE baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, metode ini juga memberikan ruang bagi informan untuk mengungkapkan pengalaman, pandangan, dan aspirasi mereka secara terbuka, sehingga hasil penelitian dapat merefleksikan kondisi sebenarnya di lapangan.